

BAB IV

REAKSI DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ZONA IDENTIFIKASI PERTAHANAN UDARA CINA

Kepulauan Senkaku jelas merupakan wilayah yang melekat di Jepang, pernyataan ini dikatakan oleh Jepang. Menurut kerangka hukum internasional, pemerintah Jepang memasukkan pulau-pulau tersebut ke dalam wilayah Jepang dengan cara yang sah pada bulan Januari 1895. Pasca Perang Dunia II, Kepulauan Senkaku ditempatkan di bawah administrasi Amerika Serikat sebagai bagian dari Okinawa oleh Perjanjian Damai San Francisco, sehingga hal tersebut menegaskan kembali status pulau-pulau sebagai bagian dari wilayah Jepang. Kemudian dalam Perjanjian Reversion Okinawa tahun 1972 dimasukkannya Kepulauan Senkaku antara Amerika Serikat dan Jepang sebagai bagian dari wilayah di mana hak administratif dikembalikan ke Jepang. Fakta ini menunjukkan Kepulauan Senkaku menjadi bagian yang konsisten dari wilayah Jepang dalam tatanan internasional pasca perang dan sudah sesuai dengan hukum internasional. (Statement by the Minister for Foreign Affairs on the announcement on the "East China Sea Air Defense Identification Zone" by the Ministry of National Defense of the People's Republic of China, 2013).

A. REAKSI JEPANG TERHADAP ZONA IDENTIFIKASI PERTAHANAN UDARA DARI CINA

Reaksi Jepang mengenai klaim Zona Identifikasi Pertahanan Udara dari Cina, Jepang menyatakan kekecewaannya dalam klaim Zona Identifikasi Peratahanan Udara dimana Kementerian Luar Negeri menyampaikan pernyataannya bahwa (Kasumigaseki, 2013):

“...pembentukan zona semacam itu di Tiongkok dan mewajibkan aturannya sendiri di dalam zona tersebut, tindakan yang sangat berbahaya yang secara sepihak mengubah status quo di Laut Cina Timur, meningkatkan situasi, dan yang dapat menyebabkan tidak diinginkan konsekuensi di Laut Cina Timur.”

Jepang kemudian menyatakan akan menempuh jalur diplomasi dan mengajak Cina untuk berdialog membahas isu *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) ini. Dalam pertemuan Sino-Jepang yang diadakan setelah APEC Summit tahun 2014 di Beijing, Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan “Jepang dan Cina adalah negara bertetangga yang menghadapi masalah individual, akan tetapi kita harus mencegah masalah tersebut merusak hubungan secara keseluruhan. Perhatian khusus Jepang telah disampaikan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri. Saya dengan segala cara berharap Anda akan merespons secara positif,” kepada Presiden Tiongkok, Xi Jinping (Gabriela, Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok, 2018).

Komunikasi yang terjalin antara Kementerian Luar Negeri Cina dan Jepang tidak menghasilkan kesepakatan. Hong Lei, selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina dalam menanggapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang pada saat konferensi, menyatakan bahwa “Tiongkok tegas dalam menegakkan keamanan nasional dan semua negara lain seharusnya tidak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Cina akan tetap teguh pada jalan pembangunan yang damai, tetap sebagai kekuatan yang kukuh dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Pasifik dan mendorong kerja sama serta pembangunan. Cina secara tegas menentang kata-kata dan tindakan yang relevan dari negara-negara yang dengan sengaja memprovokasi konfrontasi regional terlepas

dari keamanan pihak lain. Ini merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional.”

Jepang akan tetap berusaha menjaga keamanan nasional negaranya dan juga keamanan regional, serta akan merespon dengan tindakan atau dapat mengeluarkan kebijakan tertentu, yang pastinya disesuaikan dengan langkah yang dilakukan Cina berikutnya, seperti halnya rencana untuk amandemen konstitusi pasal 9. Shinzo Abe melakukan inaugurasi pada Desember 2012, Shinzo Abe memiliki komitmen untuk menjadikan Jepang sebagai negara yang penuh damai, dan hal tersebut pula yang mendasari kebijakan luar negeri yang dibuatnya. Pada tanggal 5 Januari, Perdana Menteri Shinzo Abe menegaskan bawa pemerinthannya akan tetap berada dalam jalur “*proactive contribution to international peace*” pernyataan ini dikatakan dalam konferensi pers pertamanya pada tahun 2015. Untuk mewujudkan tatanan internasional dan lingkungan keamanan yang diinginkan, Jepang harus memainkan peran yang lebih proaktif dalam mencapai perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran masyarakat internasional sebagai Kontributor Proaktif demi terwujudnya perdamaian berdasarkan pada prinsip kerjasama internasional (Hornung, 2015).

Visi Shinzo Abe dalam kebijakan luar negeri sangat konsisten dan mengacu pada tiga pilar, yaitu sebagai promotor hukum dan norma internasional, pelindung dari dunia global, serta sekutu Amerika Serikat yang efektif. Fokus dari kebijakan yang dibuat oleh Shinzo Abe adalah keamanan, dengan strategi keamanan nasional yang mempunyai prioritas sebagai berikut (Przystup, 2015).

1. Mempererat dan memperluas kemampuan dan Jepang sendiri
2. Mempererat aliansi dengan Amerika Serikat
3. Serta mempererat diplomasi dan kerjasama keamanan dengan mitra untuk perdamaian dan stabilitas di masyarakat internasional

Dalam menghadapi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan bagi Jepang, menjadi hal yang penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang efektif demi kelancaran kerjasama antara Amerika Serikat dan Jepang di seluruh spektrum untuk serangan bersenjata, yang memungkinkan tanggapan cepat terhadap de-eskalasi serta eskalasi. Dengan demikian, perlu adanya upaya yang berkelanjutan, yang berkaitan dengan perencanaan bersama, latihan bersama serta operasi gabungan.

Pertahanan Jepang, termasuk Kepulauan Senkaku harus dapat mengatasi pertumbuhan yang dapat membahayakan kemampuan Amerika Serikat untuk mengakses Jepang dan memperluas pencegahan. Pengembangan "*Joint Assured Acces Plan*" dengan cyber, ruang angkasa, rudal balistik pertahanan, intelijen, pengawasan, dan komponen pengintaian akan berfungsi baik guna memperkuat pertahanan Jepang itu sendiri (Przystup, 2015).

Aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang dibangun di atas fondasi perjanjian bilateral yang mendefinisikan ruang lingkup dan bentuk kerja sama keamanan. Mutual Defence Guidelines (MDG) pertama kali muncul pada tahun 1978 dan kemudian diperbaharui pada tahun 1997 dan 2015, yang memberikan panduan kebijakan untuk mengarahkan kerja sama aliansi. MDG akan menguraikan bagaimana Amerika Serikat dan Jepang akan berinteraksi di masa mendatang dan dalam perang sebagai parameter dasar pertahanan kerja sama berdasarkan pembagian kerja (Emma Chanlett-Avery, 2016).

Amerika Serikat dan Jepang telah berkoordinasi pada tingkat tinggi individu serta kolektif atas pengumuman ADIZ Cina dan telah menegaskan kembali kekuatan persekutuan antara AS-Jepang. Amerika Serikat sangat prihatin dengan upaya yang secara sepihak perubahan status quo di Laut Cina Timur. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Wakil Presiden

Biden dalam konferensi kunjungannya di Tokyo pada bulan Desember 2013 (Ian E. Rinehart, 2015).

Selain menempuh jalur diplomasi mengenai isu *Air Defense Identification Zone* (ADIZ), Jepang juga mengambil langkah dalam beberapa kebijakan dalam negeri, terutama dalam bidang pertahanan negara. Hal ini disebabkan karena semenjak Cina mengumumkan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ), aktivitas Cina di wilayah udara Jepang semakin meningkat. Pesawat sayap tetap (Y-12) milik Administrasi Kelautan Negara Cina menyusup ke wilayah udara Jepang di atas Kepulauan Senkaku, yang merupakan wilayah administrasi Jepang (Gabriela, Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok, 2018, hal. 468).

Kementerian Pertahanan Nasional Cina juga mengumumkan kegiatan pesawat *People's Liberation Army* (PLA) di Laut Cina Timur, yang dicurigai sebagai kegiatan pengawasan rutin dan patroli udara tempur. Selain itu, Jepang yang mengkonfirmasi telah lewatnya sebuah pesawat peringatan dini Y-8 dan sebuah pembom H-6 antara Pulau Utama Okinawa dan Pulau Miyakojima ke Samudera Pasifik untuk pertama kalinya.

Dengan menaikkan anggaran belanja pertahanan Jepang, merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah Jepang dalam membuat kebijakan terhadap pertahanan Jepang. Hal ini tentu saja dilakukan untuk memastikan keamanan wilayah Jepang dari ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Jepang mengumumkan rencananya untuk meningkatkan anggaran belanja militer dan mendapat dukungan dari negara-negara di Asia Tenggara, hal ini dikatakan pada saat Konferensi Tingkat Tinggi antara Jepang dan ASEAN di Tokyo (McGovern, 2013). Selain itu negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga mendukung langkah Jepang untuk mempertahankan kebebasan penerbangan di atas wilayah Laut Cina Timur.

Untuk tahun 2014, Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan kenaikan anggaran pertahanan dan disetujui oleh pemerintah. Kenaikan berturut-turut ini menggambarkan persiapan Jepang untuk memperkuat pertahanannya. Menteri Pertahanan Jepang, Satoshi Marimoto membenarkan adanya peningkatan anggaran tersebut dan menyatakan sikapnya “...memang menjadi pilihan yang sulit untuk meningkatkan anggaran pertahanan kami (bidang pertahanan Jepang), namun demi tercapainya kepentingan keamanan upaya ini kami tempuh menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan lainnya secara sinergis.” (Teslik, 2006).

Selain meningkatkan anggaran belanja pertahanan Jepang, pengembangan industri pertahanan dan modernisasi alutsista Jepang juga dilakukan. Upaya ini dilakukan karena merupakan bagian dari usaha pemerintah Jepang untuk melepaskan ketergantungan pasokan persenjataan dari negara lain. Terdapat beberapa industri pertahanan yang menjadi ujung tombak dari program ini adalah Komatsu Limited, Mitsubishi Electric, Japan Steel Work, Fujitsu dan beberapa industri pertahanan lainnya (Gabriela, Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok, 2018, hal. 469)

Perusahaan-perusahaan tersebut nantinya akan diorientasikan untuk menghadapi berbagai ancaman terkini bagi stabilitas dalam negeri serta regional Asia Timur, termasuk dalam menangani sikap yang impresif Cina melalui klaim *Air Defense Identification Zone* (ADIZ). (Dujarric, *China's ADIZ and the Japan-US response*, 2013) Keberadaan industri-industri itu bukan hanya berperan sebagai penyedia suku cadang, namun juga pengembangan alutsista terbaru, seperti pesawat tempur JASDF F-2 yang merupakan pengembangan dari pesawat tempur asal Amerika Serikat F-16.

Seperti contohnya mengenai hal ini yaitu Komatsu Limited sejak tahun 2008 telah mendapat lisensi dari Amerika

Serikat untuk memproduksi suku cadang penggerak bagi Tank Abrams yang dimiliki oleh *Japan Defense Force*, yang menjadikan Jepang tidak lagi bergantung pada unit alutsista, suku cadang dan *research and development* negara lain, terkhusus Amerika Serikat (Dujarric, 2013).

Kemudian untuk mendukung kemampuan sistem pertahanan, Jepang juga menerapkan sistem pertahanan terpadu. Dalam wilayah darat, Jepang membuat M270 peluncur roket dan kendaraan lapis baja ringan. Dalam wilayah laut, Lockheed Martin (produsen pesawat) menyediakan kapal angkatan khusus. Lockheed Martin juga memproduksi serta menjual sistem tempur canggih Aegis yang dapat digunakan di atas kapal angkatan laut, dan berbagai sistem rudal yang meliputi kapal selam Trident yang telah meluncurkan rudal balistik (SLBM). Pengembangan sistem pertahanan darat ke udara ini dijalankan melalui kerjasama Jepang dengan Lockheed Martin. Perusahaan ini juga berinvestasi dalam pengembangan sistem pertahanan rudal termasuk PAC-3 dan sistem THAAD (Gabriela, Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok, 2018, hal. 469).

Jepang juga mengadakan program pengembangan teknologi militer yaitu pengembangan fasilitas terpadu *Pacific Missile Range Facility* (PMRF). Teknologi militer yang dijalankan oleh Jepang ini menggunakan peluru kendali jarak menengah dengan jarak ledakan sekitar 800 km yang dinamakan DDG 173. Dengan *Pacific Missile Range Facility* (PMRF) jika suatu saat Cina atau Korea Utara meluncurkan misil ke wilayah Jepang maka akan dapat ditangkal dengan senjata canggih ini melalui peluncuran darat ke udara (*air shield*).

Selain itu, Jepang juga membangun program fasilitas persenjataan terpadu *Aegis Ballistic Missile of Defense* (ABMD). Program ini bersifat untuk menangkal misil Cina dari laut ke udara dimana misil-misil peluru kendali jarak

pendek dan menengah ditempatkan di skuadron kapal selam sekelas Kongo dan Kilo (Gabriela, Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok, 2018, hal. 470).

B. PERLUASAN MILITER JEPANG

Perluasan peran militer Jepang telah lama diupayakan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Abe mengajukan Rancangan Undang-Undang untuk mencapai tujuan tersebut, yang mengubah pemahaman mengenai konstitusi Pacifist Jepang. Sejak Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, konstitusi tersebut hanya mengizinkan Jepang untuk memiliki kekuatan militer yang sangat terbatas, hanya untuk memenuhi kebutuhan pertahanan atau *Self-Defense Force / SDF* (pasukan bela diri) (Roza, 2015, hal. 5).

Shinzo Abe memandang bahwa pembatasan tersebut sudah tidak relevan di tengah kawasan Asia Pasifik yang terus memanas. Jepang merasa tidak dapat lagi mengesampingkan stabilitas kawasan dan harus lepas dari naungan keamanan Amerika Serikat. Perubahan kebijakan memang dibutuhkan guna memastikan kemampuan Jepang untuk menghadapi tantangan keamanan yang terus menerus berkembang di kawasan, antara lain kemajuan pesat kekuatan teknologi militer Cina, Abe mengklaim melalui Buku Putih Pertahanan Jepang yang telah dirilis pada Agustus 2014.

Upaya yang dilakukan oleh Shinzo Abe untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang tersebut tidak hanya memicu perdebatan keras dalam parlemen, akan tetapi puluhan ribu warga juga ikut turun ke jalan melakukan protes penolakan, karena dinilai melanggar konstitusi dan berpotensi menyeret Jepang dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat. Para pengamat menilai bahwa RUU tersebut merupakan sebuah penghinaan terhadap konstitusi dasar yang cinta damai, dan memiliki risiko mengubah arah Jepang yang

dipandang sebagai negara damai dan demokratis. Dalam mendorong pengesahan RUU tersebut, PM Shinzo Abe dianggap telah menggunakan cara yang otoriter (Roza, 2015, hal. 6).

Dengan disetujuinya Undang-Undang pertahanan tersebut akan mengubah posisi Jepang yang selama ini sebagai negara pasifis. Undang-Undang ini akan membawa perubahan terbesar bagi kekuatan pertahanan Jepang sejak Perang Dunia II. Jepang dapat mengirim tentaranya ke luar negeri. Undang-Undang tersebut juga akan merevisi larangan pertahanan kolektif atau membela sekutu yang menghadapi serangan. Didalamnya disebutkan bahwa Jepang dapat membela sekutu dalam situasi di mana ada resiko yang jelas bahwa keberadaan dari Jepang terancam dan hak-hak rakyatnya terganggu melalui serangan terhadap negara yang memiliki hubungan dekat dengan negara Jepang. Revisi tersebut juga meliputi penghilangan hambatan geografis pada dukungan logistik untuk pasukan dalam “situasi yang secara signifikan akan mempengaruhi keamanan Jepang” (Roza, Perluasan Militer Jepang dan Perubahan Perimbangan Kekuatan di Kawasan Asia Pasifik, 2015).

C. PENGUATAN ALIANSI JEPANG-AS DALAM *THE NEW NATIONAL DEFENSE PROGRAM GUIDELINES* TAHUN 2014 SEBAGAI ORIENTASI BALANCING JEPANG TERHADAP KEIJAKAN CINA “*EAST CINA SEA AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE TAHUN 2013*”

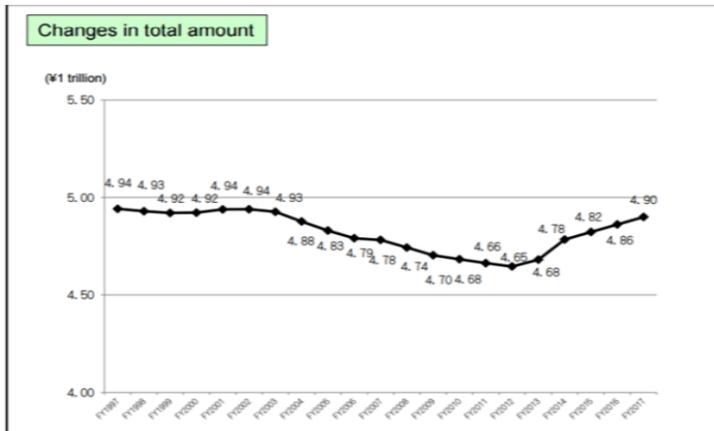
Pembaharuan kerja sama yang dilakukan antara Jepang-AS dilihat dari pertimbangan aspek ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, serta tantangan norma-norma internasional yang dilakukan oleh negara-negara di sekitar kawasan seperti (Roza, Buku Putih Pertahanan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Sengketa Laut China Timur, 2014):

- (1) Program nuklir dan rudal Korea Utara serta masalah kemanusiaan
- (2) Paksaan serta perilaku tidak stabil dalam domain maritim
- (3) Kegiatan yang dapat mengganggu dalam ruang dan dunia maya
- (4) Proliferasi senjata pemusnah massal

Aktifitas Cina di Kepulauan Senkaku secara jelas dapat dikategorikan pada poin nomor 2 sebagai paksaan dan tindakan tidak stabil dalam domain maritim Laut Cina Timur khususnya perairan kepulauan Senkaku. Jepang melakukan *balancing* terhadap ancaman Cina baik secara internal maupun eksternal.

Jepang melakukan external balancing dengan meningkatkan anggaran FY 2014 sebesar 2,2% dari national defense budget FY 2013, peningkatan teknologi serta kapabilitas militernya. Jepang juga akan meningkatkan jumlah kapal angkatan maritim dengan menambah kapal baru yang multifungsi, 2 kapal perusak Aegis yang dilengkapi dengan 8 kapal perusak serta meningkatkan jumlah kapal selam. Sedangkan Angkatan Udara Jepang (ASDF) akan menambah jumlah pesawat tempur F-35A sebanyak 6 buah (Basic Policy for the Development of New Security Legislation, 2014). Seluruh peningkatan alutsista tersebut akan dipenuhi Jepang melalui peningkatan anggaran pertahanan di tahun 2014 yang dituangkan dalam buku putih pertahanan Jepang. Pada tahun 2015, Kementerian Pertahanan Jepang melakukan peningkatan sebesar 2,4% yang ditujukan untuk memperkuat pertahanan maritim serta udara Jepang (Kallender, 2014).

Gambar 4.1 : Kenaikan Anggaran Militer Jepang



Sumber: (Pramiswara, 2017)

Untuk mewujudkan hal tersebut, Jepang pada bulan Juli 2014 mengubah pasal 9 yang memiliki tujuan memperluas hak-hak pertahanan diri angkatan militer Jepang sehingga dapat membuka peluang bagi Jepang untuk berperan lebih besar dalam porsi aliansinya dengan AS. Pasal 9 berisi mengenai larangan penggunaan *self defense* untuk tujuan kekerasan atau penyerangan dalam hubungan internasional dalam segala bentuk (Roza, Buku Putih Pertahanan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Sengketa Laut China Timur, 2014, hal. 3). Pasal ini lalu ditafsirkan berbeda dengan mengkaitkan pada pasal 13 yang mengatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup, bebas serta bahagia. Berdasarkan penafsiran itu, pasal 9 tidak dapat digunakan untuk melarang kegiatan pertahanan Jepang dalam menanggapi sikap Cina yang mengancam keamanan serta kedamaian hidup warga negaranya (Constitution and The Basis of Defense Policy, 2014, hal. 119-121).

Dengan penafsiran Pasal 9 yang lebih luas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya akan memberikan kesempatan bagi Jepang untuk lebih berperan aktif dalam hubungan

aliansinya merupakan salah satu cara Jepang untuk menunjukkan kepada AS bahwa Jepang adalah aliansi potensial yang tidak hanya memanfaatkan keuntungan dari kerja sama keamanan yang telah diberikan oleh AS. Karena sudah lama AS menuntut adanya porsi yang seimbang dalam hubungan kerja sama keamanan yang mereka lakukan. Peningkatan porsi Jepang dalam kerja samanya juga dapat berpengaruh terhadap penilaian dari negara tetangga Jepang yang lain. Negara tetangga Jepang akan melihat Jepang sebagai sekutu yang potensial sehingga negara-negara tetangga yang memiliki masalah keamanan dengan Cina akan melakukan kerja sama keamanan dengan Jepang. Kepercayaan dari negara-negara tetangga ini sangat penting bagi Jepang, pasalnya Jepang dikenal sebagai *regional power* di Kawasan Asia Timur.

Adanya penafsiran baru mengenai Pasal 9 tersebut membuat adanya perubahan NDPG yang sejalan dengan penafsiran baru pada pasal tersebut tahun 2014. *The New National Defense Program Guidelines* (NDPG) secara umum merupakan panduan pengaturan pertahanan Jepang untuk tahun 2014, yang disusun pada tanggal 4 Desember 2013 kurang lebih 1 minggu setelah pemberlakuan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Cina dan telah disetujui oleh Dewan serta Kabinet Keamanan Nasional Jepang pada tanggal 17 Desember 2013 (New National Defense Program Guidelienes, 2014, hal. 139-141). Ini bukanlah NDPG pertama yang dibuat oleh Jepang dikarenakan Jepang sejak tahun 1976 telah memiliki NDPG sebagai landasan kegiatan pertahanannya yang terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan keamanan di sekitar Jepang.

Terdapat perbedaan yang terlihat dalam NDPG tahun 2010 yang lebih menekankan pada *Dynamic Defense Force* sedangkan untuk NDPG tahun 2014 ditekankan kepada *Dynamic Joint Defense Force* (New National Defense Program Guidelienes, 2014). Perbedaan dari kedua NDPG tersebut ialah bahwa NDPG tahun 2014 lebih menekankan

pada sistem pertahanan yang berbasis operasi bersama yaitu dengan Amerika Serikat, secara langsung dapat kita ketahui sebagai usaha penguatan aliansi kedua negara tersebut. Sementara itu NDPG tahun 2010 lebih menekankan kepada upaya Jepang dalam membangun kekuatan pertahanannya yang berbasis *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (ISR). Jepang menganggap bahwa NDPG tahun 2010 tidak lagi tepat dalam menghadapi zona abu-abu yang semakin meningkat di sekitar Jepang sebab NDPG tahun 2010 dianggap tidak mendukung logika pengembangan dan pembangunan kuantitas serta kualitas angkatan Jepang (New National Defense Program Guidelienes, 2014). NDPG tahun 2014 secara umum membahas mengenai untuk meningkatkan kekuatan Jepang sendiri, memperkuat aliansi Jepang-AS serta promosi aktif kerja sama keamanan.

Balancing secara eksternal dilakukan dengan cara pembaharuan serta peningkatan kerja sama keamanan antara Jepang dengan AS dalam *program guidelines* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Ministry of Defense, 2013). Bagi Amerika Serikat, revisi aliansi yang dilakukan oleh Jepang ini sesuai dengan tujuan Amerika Serikat dalam strategi *rebalancing* dalam Kawasan Asia Pasifik. Sementara itu bagi Jepang, revisi yang dilakukan sesuai dengan fokus Jepang dalam menjaga wilayahnya dari negara-negara lain dan kebijakan "*Proactive Contribution to Peace*" yang berdasarkan pada kerja sama internasional. Jepang dan AS telah sepakat untuk meningkatkan koordinasi seluruh instansi pertahanan antar kedua negara untuk berbagi informasi, kebijakan serta koordinasi operasional agar menjadi lebih baik lagi (Ministry of Defense, 2013).

Terdapat beberapa alasan bagi Jepang untuk memilih Amerika Serikat sebagai rekan aliansinya yaitu (Nogami, 2013):

a. *Availability of allies*

Jepang menganggap terdapat kesamaan persepsi ancaman dalam melihat Cina serta kemampuan Amerika Serikat yang memenuhi syarat *availability of allies* bagi Jepang sebagai rekan aliansinya menghadapi ancaman dari Cina.

b. *Offensive power*

Negara yang memiliki offensive power yang baik maka akan memiliki kemampuan untuk menyerang dengan baik pula sehingga dirasa lebih mampu serta potensial untuk diajak bekerja sama dalam bidang keamanan. Seperti yang diketahui bahwa AS memiliki kapabilitas militer yang baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga baik menjadi aliansi bagi Jepang dalam menghadapi meningkatnya ancaman *offensive power* Cina setelah *East Cina Sea Air Defense Identification Zone* (ECS ADIZ).

c. Amerika Sentris

Jepang pada dasarnya memiliki keinginan untuk meningkatkan kerja sama bilateral dengan Korea Selatan dalam menghadapi tidak pastinya atas perkembangan Cina dan Korea Utara. Namun Korea Selatan tidak menunjukkan keinginan yang sama, pasalnya Korea Selatan tidak memiliki anggapan ancaman yang sama terhadap Cina. Korea Selatan melihat bahwa meningkatkan hubungan dengan Cina merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan demi menghadapi isu nuklir dari Korea Utara. Hal ini kemudian yang membuat PM Shonzo Abe lebih dominan kepada Amerika Sentris daripada Asia Sentris. Pemerintahan Jepang pada masa ini lebih meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dalam berbagai bidang terutama keamanan.

d. Perjanjian antara Jepang dengan Amerika Serikat

Amerika Serikat memberikan ketegasan dukungannya terhadap Jepang sebagai aliansinya yang ditunjukkan Hagel dengan menjaga komitmen AS pada sekutunya yaitu Jepang berdasarkan pasal 5 dari kerja sama mereka yang diterapkan untuk Kepulauan Senkaku. Pasal 5 tersebut menjelaskan bahwa AS dan Jepang akan mengambil tindakan bilateral jika terjadi serangan bersenjata terhadap Jepang. AS memiliki kewajiban dalam pasal ini yaitu jika terdapat sebuah serangan dari negara lain yang menyerang Jepang maka AS harus bertindak segera untuk menyiapkan pasukan militernya.

Terdapat 3 aspek pembaharuan yang dilakukan untuk memperkuat aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat (Japans Security and Defense Policy, 2014):

a. *Strengthening Deterrence and Respose Capabilities of the Japan-U.S Alliance:*

Jepang dan Amerika Serikat akan meningkatkan kemampuan deterrence serta response dalam menghadapi ancaman di wilayah Pasifik Barat yang diimbangi dengan peningkatan kerja sama antara Jepang dengan Amerika Serikat setiap harinya untuk menanggapi zona abu-abu di sekitar Jepang. Jepang akan meningkatkan pelatihan *Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance* (ISR), penggunaan fasilitas dan area bersama dengan Amerika Serikat serta memperketat kerja sama operasi dan koordinasi kebijakan antara Jepang dan Amerika Serikat.

b. *Strengthening and Expanding Cooperation in a Broad Range of Fields:*

Aliansi yang terjalin antara Jepang dengan Amerika Serikat akan meningkatkan kontribusi dalam menciptakan perdamaian serta stabilitas dunia bukan hanya dengan memperkuat kerja sama dalam bidang anti pembajakan, bantuan pengembangan kapasitas,

bantuan kemanusiaan atau bencana alam, perdamaian dan kontra terorisme. Juga dalam penguatan dalam urusan maritim, luar angkasa, dan dunia maya. Selain itu Jepang dan Amerika Serikat akan memperluas kerja sama dalam bidang intelijen, informasi, pertahanan, alutsista dan teknologi.

c. *Steady Implementation of Measures Relating to the Stationing of the U.S forces in Japan:*

Jepang akan menyediakan tempat yang efektif bagi pasukan Amerika Serikat di Jepang dengan segala fasilitasnya yang diikuti dengan penataan ulang kembali di beberapa lokasi untuk meminimalisir dampaknya terhadap warga Jepang di sekitar area tersebut.

Dengan adanya pembaharuan tersebut menunjukkan bahwa Jepang serius dalam merespon tindakan agresif Cina di Laut Cina Timur (Kepulauan Senkaku). Pembaharuan yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat menunjukkan upaya penyeimbangan ancaman oleh Jepang atas ancaman yang ditimbulkan oleh Cina melalui *balancing* dengan menggandeng Amerika Serikat sebagai rekan aliansinya. Jepang dan Amerika Serikat juga melakukan beberapa fungsi pengaturan peran masing-masing dalam menghadapi serangan angkatan bersenjata. Melakukan peningkatan latihan militer antara *Japan Self Defense Force* (JSDF) dan Pasukan Militer Amerika Serikat dalam masa damai sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan operasional serta kemampuan respon bersama. Hal tersebut dilakukan guna menjaga teritorial dan menguatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman yang dilakukan oleh Cina dari segi *offensive power* (Defense of Japan, 2014).

Hal yang tidak kalah penting yaitu pengembangan unit amfibi sebagai salah satu armada utama yang menjaga pulau lepas pantai seperti Kepulauan Senkaku. Untuk sementara ini Jepang memiliki 760 personil unit amfibi dan akan menambah 300 personil di tahun 2018 (Defense of Japan, 2014, hal. 190).

Untuk mewujudkannya Jepang dan Amerika Serikat akan melakukan kerja sama peningkatan latihan gabungan marinir antara Jepang dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Jepang mengenai unit amfibi. Selain itu, untuk melengkapi kecanggihan teknologi militernya, Jepang dan Amerika Serikat mengadakan kerja sama dalam bidang alutsista dan teknologi dalam program interseptor atau penangkal rudal balistik canggih untuk pertahanan rudal balistik. Pada tahun 2015 Jepang dan Amerika Serikat akan meningkatkan kerja sama untuk membangun penangkal rudal balistik SM3- Block II A dengan anggaran dana sebesar ¥ 9,2 M. Penangkal rudal ini akan di tempatkan pada kapal perusak sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dari Armada Maritim Jepang di Laut Cina Timur untuk menjaga Kepulauan Senkaku serta yang lainnya (Defense of Japan, 2014, hal. 16).

D. HUBUNGAN JEPANG DENGAN KOREA SELATAN

Bagi Jepang, Korea Selatan merupakan negara tetangga yang sangat penting. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan strategis sebagai sekutu dari Amerika Serikat. Kerjasama yang erat antara Jepang dan Korea Selatan dalam bidang keamanan memiliki pengaruh yang besar bagi perdamaian dan stabilitas dalam wilayah Asia Pasifik. Kedua negara bersepakat untuk bertukar pandangan mengenai isi dari kesepakatan keamanan informasi (Information Security Agreement). Pada bulan Oktober tahun 2014 Jepang dan Korea Selatan datang dalam acara *Seoul Defense Dialogue* yang diadakan di Korea Selatan. Pada bulan April 2015 telah diselenggarakan pembicaraan mengenai dialog keamanan dalam hal kebijakan keamanan serta kebijakan pertahanan pada tingkat *working – level* antara kedua negara sebagai yang pertama dalam lima tahun terakhir. Di perairan barat Kyushu, *Japan Maritime Self Defense Force* (JMSDF) mengadakan latihan bilateral penyelamatan (*search and rescue bilateral*

exercise) pada bulan Desember 2013, yang kemudian meningkatkan koordinasi antara JMSDF dengan Angkatan Laut Korea Selatan (Ministry of Japan, 2015).

Dalam menanggapi kebijakan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Cina, Jepang melakukan patrol udara di Laut Cina Timur begitu pula dengan Korea Selatan yang juga melakukan patrol udara, serta membeli sejumlah drone, atau pesawat militer tanpa awak untuk memantau situasi di kawasan dan tank amfibi (Paw, Analisa Politik Luar Negeri Jepang terhadap Pemberlakuan ADIZ Cina, 2017).

Angkatan udara Cina melakukan rangkaian latihan di Laut Jepang atau Laut Timur pada Desember 2017. Latihan yang dilakukan tersebut membuat sejumlah jet militer Jepang dan Korea Selatan bersiaga. Shen Jinke, juru bicara Angkatan Udara Cina mengatakan bahwa latihan militer tersebut rutin dilakukan oleh Cina dan sah menurut hukum internasional dan menganggap Laut Jepang merupakan perairan internasional dan bukan milik Jepang. Meskipun latihan diadakan di Laut Jepang atau Laut Timur, sejumlah pesawat tempur dan pesawat pengebom Cina sempat melewati Selat Tsushima di selatan Laut Jepang atau Laut Timur, yang memisahkan antara perairan Korea Selatan dan Jepang. Shen Jinke juga mengatakan jika pasukannya turut merespon pergerakan pesawat militer Korea Selatan saat latihan sedang berlangsung.

Sementara itu, Kantor Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan telah membenarkan bahwa sejumlah pesawat jet milik Korea Selatan telah dikerahkan ke Laut Jepang atau Laut Timur untuk bersiaga menanggapi latihan militer Cina tersebut. Korea Selatan menyebutkan bahwa pasukannya mendapati lima jet tempur milik Cina memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara negara. Seoul pun mengklaim bahwa jet-jet tempur Cina itu juga telah terbang melewati zona pertahanan udara milik Jepang. Militer Korea Selatan menyatakan pesawat tempur miliknya hanya melakukan tindakan taktis yang normal, dengan mengidentifikasi pesawat

Cina dan melakukan pengawasan udara hingga pesawat militer Cina pergi (Suastha, 2017)

E. PERUBAHAN PERIMBANGAN KEKUATAN DI KAWASAN

Setelah Perang Dunia II, konstitusi Jepang menyampaikan bahwa negara itu tidak boleh memiliki angkatan perang atau angkatan bersenjata, akan tetapi pasukan pertahanan yang terbatas. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa *Self Defense Force* (SDF) adalah sebuah kekuatan yang sangat signifikan di kawasan yang di dukung oleh sistem pertahanan yang mutakhir. Serta anggaran pertahanan dari Jepang menempati urutan ketujuh yang terbesar di dunia (Roza, 2015).

Dengan memperluas peran militer Jepang akan memaksa kekuatan-kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik untuk dapat mempertimbangkan terhadap kebijakan strategisnya agar dapat merespons munculnya kekuatan besar yang baru terlepas dari belenggunya. Tidak hanya kekuatan utama yang ada di kawasan, seperti Cina, Amerika Serikat, dan India yang akan melakukan penyesuaian, melainkan kekuatan yang lebih kecil di kawasan Asia Tenggara juga akan berpengaruh terhadap dinamika yang dijalankan ini.

Terdapat faktor yang sangat mempengaruhi dari arah kebijakan strategis kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik yaitu pertumbuhan kekuatan serta teknologi militer yang begitu pesat dan tidak transparan, juga perilaku asertif Cina. Negara-negara di kawasan memandang bahwa diperlukan kekuatan-kekuatan yang dapat mengimbangi untuk merespons kebangkitan dari Cina.

Pada saat dekade yang lalu sebagian negara di kawasan, seperti Filipina, Australia selalu mendorong Amerika Serikat untuk dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap

perkembangan militer Jepang. Akan tetapi untuk saat ini, kekuatan militer Jepang dianggap sebagai kekuatan yang strategis sehingga dibutuhkan untuk mengimbangi kebangkitan dari Cina. Hal ini tentu saja membuat Jepang harus menjalankan tanggungjawab yang lebih besar dalam pakta pertahanannya dengan Amerika Serikat (Roza, 2015, hal. 6).

Menurut pakta pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat, jika mereka berada dalam ancaman serangan dari negara lain maka Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk melindungi Jepang. Dengan adanya perluasan militer yang dilakukan, Jepang dapat melakukan hal yang sebaliknya. *Self Defense Force* (SDF) dapat digelar di luar negara Jepang untuk mendukung Amerika Serikat serta negara sahabat yang lain. Hal ini juga diperlukan untuk Jepang dapat meyakinkan Amerika Serikat bahwa mereka merupakan sekutu penting yang dapat merespons tuntutan dari Amerika Serikat. Jepang akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi keamanan serta stabilitas internasional pada umumnya, dan menentukan arah keamanan kawasannya. Hal paling utama dari perluasan militer ini ialah Jepang tentu akan mempunyai kekuatan yang lebih besar pula dalam menangani kasus perebutan wilayahnya dengan Cina.

Dikurangnya pembatasan terhadap peran militer Jepang akan membuat hubungan persekutuan antara Jepang dan Amerika Serikat menjadi semakin erat, bagi Amerika Serikat. Dengan perluasan peran militer akan membuat pembagian beban yang lebih seimbang dari sebelumnya dalam hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat tersebut. Hal ini telah lama menjadi tuntutan dari Amerika Serikat terhadap Jepang dan tidak mengalami penurunan meskipun dari Pemerintahan Obama menjalankan strategi *rebalancing* di kawasan Asia Pasifik.

Bagi Amerika Serikat dengan adanya perubahan ini akan membuat Jepang sebagai negara yang mempunyai peran

sentral dalam langkah *Pacific Pivot* Amerika Serikat, di tengah tekanan keterbatasan anggaran pertahanannya. Hal ini membuat keraguan dari sebagian pihak atas kemampuan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Akan tetapi, dengan adanya pengurangan beban tersebut akan memantapkan upaya Amerika Serikat dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, bersama Jepang dan negara berkepentingan yang lainnya dalam menghadapi Cina (Roza, 2015, hal. 7).

India merupakan negara yang kekuatan utama lainnya harus diperhitungkan dalam perubahan perimbangan kekuatan ini. Anggaran pertahanan India menempati posisi 8 dengan pertahanan terbesar di dunia, dan akan menaikkan anggaran pertahanannya sebesar 7,9% untuk mempersempit kesenjangan militer dengan Cina dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kawasan. India mempunyai militer yang cukup kuat serta signifikan, dari segi kebijakan luar negerinya, *Act East Policy* juga sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat dan Jepang dalam merespon peningkatan pengaruh Cina di kawasan Asia Timur dan Tenggara. India dipandang sebagai kekuatan potensial yang dapat berpengaruh terhadap keseimbangan kekuatan oleh negara-negara di kawasan.

Upaya untuk menjamin akses India terhadap jalur-jalur pelayaran tertentu dan mencegah pemanfaatan dari jalur tersebut oleh Cina untuk mendominasi wilayah Samudera Hindia merupakan cara bagi India dalam mengimbangi kekuatan serta mencegah dominasi Cina di Laut Cina Selatan (LCS). Fokus kekuatan dari Cina yaitu untuk mendominasi Laut Kuning, Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur. Sementara itu Samudera Hindia masih termasuk dalam prioritas keduanya. Bagi India, untuk memastikan Cina yang selalu berusaha untuk mendominasi dengan prioritas pertamanya merupakan kepentingannya (Roza, 2015).

Cina juga perlu memperhitungkan mengenai terdapat kekuatan-kekuatan yang lebih kecil di kawasan. Terdapat kesamaan kebijakan mengenai Laut Cina Selatan antara Jepang dengan India, yaitu kedua negara memiliki penekanan terhadap pentingnya meningkatkan kapasitas aktor-aktor regional dalam menjamin kebebasan navigasi di kawasan, seperti contohnya penguatan Vietnam dengan bantuan dari Filipina, dan India oleh Jepang. Hal ini akan membuat Jepang dan India dilihat sebagai sekutu yang potensial bagi kekuatan-kekuatan menengah yang juga tak kalah penting untuk mengimbangi kekuatan dari Cina (Roza, 2015, hal. 8).

Implementasi konsep aliansi kedalam isu dengan kebijakan luar negeri Jepang terhadap kebijakan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Cina yang telah memasukkan Kepulauan Senkaku ke wilayah pertahanan udara Jepang secara sepihak adalah memperkuat militer negara dengan meningkatkan anggaran pertahanan serta berusaha memperluas aliansi dengan negara-negara yang lebih kuat seperti Amerika Serikat dan negara lainnya. Jepang juga melakukan patrol udara bersama Korea Selatan di Laut Cina Timur.